

DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL-KEAGAMAAN PADA MASYARAKAT NELAYAN DI KARANGANTU, BANTEN

Yanwar Pribadi

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: yanwar.pribadi@uinbanten.ac.id

Abstract: This paper explores the dynamics of socio-religious interactions among the inter-ethnic fishermen community in the former seaport of the Sultanate of Banten, i.e. in the Karangantu Port, Serang, Banten. The study focuses on the socio-religious interactions between migrants and local residents, and among the migrants themselves. This paper more broadly investigates the government's policies on marine and fisheries sectors since 2000. Main issues discussed are the background of the history of Banten as the center of maritime power; the arrival and interaction between foreign and Nusantara traders and fishermen and local people; decentralization policies; patterns and forms of the inter-ethnic interactions; and the influence of decentralization policies towards the development of Banten's maritime world. This paper uses ethnographical and historical approaches. The author argues that the inter-ethnic interactions in the Banten north coast area are socio-economic-cultural interactions that have long been intertwined and can be regarded as ideal multiculturalism interactions on the one hand. However, the policies of the central and regional government in marine and fisheries sectors have not generated the right solution to improve and empower Banten's fishermen community, as it did occur in the 16th and 17th centuries.

Keywords: Fishermen; socio-religious; decentralization; inter-ethnic interactions.

Pendahuluan

Kesultanan Banten pernah menjadi pusat kekuasaan maritim terkemuka di Asia pada abad ke-16 dan 17. Kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Nusantara, dan hubungan diplomatiknya terjalin hingga ke Arab Saudi melalui permintaan gelar sultan. VOC bahkan

mengalami kesulitan menguasai Banten hingga akhir abad ke-17. Pengaruh kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Sumatera, seperti Lampung, dan juga beberapa wilayah di Jawa Barat.

Secara umum, Banten adalah kerajaan dengan budaya bahari yang kuat. Di sana terdapat beberapa pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan internasional. Di antaranya adalah Karangantu, Pontang, dan Tanara. Ketiganya berhasil menarik perhatian pedagang dan nelayan mancanegara dan daerah-daerah lain di Nusantara. Pada masanya, Banten adalah salah satu daerah yang paling kosmopolis di Nusantara dengan kedatangan dan menetapnya pedagang, nelayan, dan kelompok-kelompok profesi lainnya seperti orang-orang dari Tiongkok, India, Semenanjung Melayu, Jazirah Arab, Turki, Portugal, Belanda, Inggris, Prancis, dan daerah-daerah di Nusantara seperti orang-orang Bugis, Lampung, Madura, Ternate, Makassar, dan Cirebon.

Pasca-kemerdekaan Indonesia, Banten mengalami kemunduran yang signifikan. Secara administratif Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2000 ketika Banten berdiri menjadi sebuah provinsi sendiri. Daerah pedalaman Banten yang pada masa kesultanan adalah daerah tertinggal, pada masa kemerdekaan keadaannya tidak menjadi lebih baik. Lebak bahkan menjadi daerah paling tertinggal di Jawa Barat. Keadaan di pesisir pun merefleksikan hal yang serupa. Karangantu, Pontang, dan Tanara kehilangan reputasinya sebagai pelabuhan yang pernah memainkan peran penting dalam sistem pelayaran dan perdagangan Nusantara, dan sebagian besar masyarakat nelayannya hidup di lingkaran kemiskinan. Namun, ketiganya, terutama Karangantu, tetap memiliki peran penting sebagai pelabuhan perikanan di Banten. Masyarakat Karangantu tetap mempertahankan 'reputasinya' sebagai daerah kosmopolis yang tetap menarik perhatian nelayan dari daerah-daerah lain di Indonesia, terutama pada musim melaut. Selain itu, kelompok etnis Bugis, Lampung, dan Cirebon bahkan memiliki perkampungan sendiri di sana dan hingga kini sebagian besar tetap mempertahankan budaya dan tradisinya masing-masing sambil berakulturasi dengan budaya dan tradisi Banten. Mereka membentuk budaya hibrid yang merupakan budaya percampuran antara pemikiran dan tradisi-tradisi yang mereka bawa dari tempat asal dan tradisi-tradisi serta pemikiran masyarakat Banten.

Kertas kerja ini mengeksplorasi dinamika hubungan sosial-keagamaan pada masyarakat nelayan antaretnis di bekas pelabuhan utama Kesultanan Banten dengan studi kasus di Pelabuhan Karangantu, Kota Serang, Provinsi Banten pada masa desentralisasi (pasca-Orde Baru). Fokus utamanya adalah hubungan sosial-keagamaan antara pendatang, yaitu orang-orang Bugis, Lampung, dan Cirebon dengan orang Banten dan dengan sesama mereka. Tulisan ini secara lebih luas menginvestigasi kebijakan pemerintah mengenai sektor kelautan dan perikanan setelah diterapkannya otonomi daerah sejak tahun 2000. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah latar belakang sejarah Banten sebagai pusat kekuasaan maritim terkemuka; kedatangan dan interaksi pedagang dan nelayan mancanegara dan Nusantara dengan masyarakat Banten; kebijakan desentralisasi; pola dan bentuk hubungan antaretnis di Banten; dan pengaruh serta dampak kebijakan desentralisasi terhadap perkembangan dunia maritim Banten.

Pendekatan penelitian dan penulisan dalam tulisan ini adalah antropologis-historis. Penelitian lapangan dilakukan selama satu bulan antara bulan April-Mei 2016 dan digabungkan dengan penggunaan sumber-sumber tertulis melalui studi pustaka, sedangkan alur penulisan menggunakan pendekatan sinkronik. Argumen yang ditawarkan di tulisan ini adalah bahwa di satu sisi, hubungan antaretnis di daerah pesisir Banten adalah hubungan sosial-ekonomi-budaya yang telah telah terjalin lama dan dapat dijadikan sebagai bentuk hubungan multikulturalisme yang ideal. Namun, di sisi lain kebijakan desentralisasi dan kebijakan pemerintah pusat dalam masalah kelautan dan perikanan belum mampu memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan kehidupan perekonomian dan memberdayakan masyarakat nelayan Banten, seperti yang terjadi pada abad ke-16 dan 17.

Banten sebagai Pusat Kekuasaan Maritim Terkemuka

Keresidenan Banten pada masa Orde Baru terdiri dari tiga kabupaten: Serang, Pandeglang, dan Lebak. Secara umum, Banten memiliki dua karakteristik geografis yang berbeda. Bagian selatan ditandai dengan banyaknya dataran tinggi dan memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan bagian utara. Sementara itu, bagian utara memiliki dataran rendah yang luas dan jumlah penduduknya pun lebih banyak. Penduduk Banten yang utama berasal

dari etnis Sunda yang menetap di bagian selatan, sedangkan etnis Jawa yang pada mulanya berasal dari Demak dan Cirebon kebanyakan menetap di bagian utara. Orang Kanekes atau Baduy, yang mengembangkan kebudayaan mereka sendiri, tinggal di pegunungan di bagian selatan.¹ Sartono Kartodirdjo menunjukkan bahwa perbedaan antara Banten utara dan selatan harus dilihat dari unsur lingkungan, faktor ekologis, sekaligus perbedaan dalam asal-usul sosial-budaya dan asal-usul historis.² Kedua kelompok etnis tersebut menunjukkan perbedaan dalam hal bahasa dan adat-istiadat. Sebagai contoh, bagi orang Belanda, orang Banten utara terkenal karena fanatisme religius mereka, sikap agresifnya, dan semangat memberontaknya. Selain itu, dalam melihat perbedaan dalam hal bahasa, Mikihiro Moriyama berpendapat bahwa kesadaran perbedaan dalam hal bahasa, budaya dan etnisitas tidak terindikasi di Jawa Barat sebelum abad ke-19. Pemerintah kolonial dan para sarjanalah yang memaksa orang Jawa Barat untuk mengidentifikasi diri mereka secara berseberangan dengan orang Jawa dan orang Melayu.³

Secara umum, daerah pedalaman Banten lebih subur. Bagian utara, terutama daerah pesisir, memiliki karakter lanskap persawahan yang tidak teririgasi dengan baik, tingkat kegagalan panen yang tinggi, dan hampir tidak adanya tanaman lain selain sawah.⁴ Namun, Sartono Kartodirdjo memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Ia mengatakan bahwa tanah persawahan yang paling teririgasi ditemukan di lereng gunung dan dataran di utara, dan oleh karena itu wilayah kekuasaan sultan ditemukan di dataran utara. Sementara itu, daerah pegunungan dan perbukitan di selatan adalah daerah di mana budidaya padi kering dipraktikkan. Lebih jauh, ia menunjukkan bahwa daerah ini kering dan tidak teririgasi.⁵ Penjelasan terbaik mengenai adanya perbedaan antara pendapat Williams dan Kartodirdjo mengenai kesuburan daerah Banten terletak pada adanya perubahan bentuk persawahan yang sering berubah sepanjang waktu yang menyebabkan sebuah wilayah

¹ Robert Wessing, "The Position of the Baduj in the Larger West Javanese Society", *Man*, New Series, Vol. 12, No. 2 (1977), 293.

² Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course, and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966), 30.

³ (Moriyama dalam Atsushi, 2006: 174).

⁴ Michael Williams, *Communism, Religion, and Revolt in Banten* (Athens: Ohio University Center for International Studies, 1990), 2-4.

⁵ Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt*, 31.

tidak selalu memiliki daerah persawahan yang baik. Selain itu, juga menarik jika kita melihat pendapat Heriyanti O. Untoro yang menyebutkan bahwa ada perubahan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi tanah liat di Banten untuk pembuatan gerabah selama ratusan tahun.⁶

Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1525—Kartodirdjo mengatakan bahwa ia berdiri pada tahun 1520,⁷ sedangkan Atsushi secara berhati-hati menyebutkan bahwa Kesultanan Banten berdiri antara tahun 1522 dan 1527⁸—memiliki teritori hingga ke daerah-daerah yang meliputi Jasinga (Bogor), Tangerang, dan Lampung. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Banten melakukan aktivitas perdagangan yang seimbang dengan orang asing dan membuat perjanjian dengan orang Portugis, Inggris, dan Belanda. Banten adalah sebuah pelabuhan, kota perdagangan, pusat penyebaran Islam, pusat pendidikan, dan pusat pemerintahan sekaligus. Selain itu, ia adalah sebuah kota yang sangat sibuk dengan beragam aktivitas lainnya. Kemunculan perdagangan lada dan komoditas lain berjalan beriringan dengan perkembangan Banten. Perdagangan lada dimonopoli oleh keluarga sultan dan penguasa lainnya, dan oleh karena itu, sejumlah besar bangsawan bekerjasama dengan pedagang-pedagang asing. Perdagangan tersebut memberikan penghasilan utama bagi kesultanan. Sebagai tambahan, pajak dari ekspor barang dan bea pelabuhan juga berkontribusi secara signifikan bagi kemajuan Banten.⁹

Barang-barang dagangan yang menjadi komoditas utama adalah bahan makanan berupa beras dan hasil bumi lainnya seperti sayur-mayur dan buah-buahan serta hasil ternak. Melalui perdagangan, keuntungan ekonomi yang diperoleh Banten bukan hanya berasal dari jual-beli semata. Barang yang masuk ke pelabuhan dikenakan bea cukai yang besarnya ditentukan oleh syahbandar. Sebagai gambaran, pada tahun 1608 Syahbandar Banten menarik bea cukai dan pajak

⁶ Heriyanti O. Untoro, *Kebesaran dan Tragedi Kota Banten* (Jakarta: Yayasan Kota Kita, 2006), 129

⁷ Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt*, 53.

⁸ Ota Atsushi, *Changes of Regime and Social Dynamics in West Java: Society, State, and the Outer World of Banten 1750-1830* (Leiden and Boston: Brill, 2006), 16.

⁹ M.A.P. Meilink-Roelofs, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1600* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1962), 392.

terhadap Kapal “Banten” milik VOC yang akan mengekspor 8.440 karung lada sebesar fl 11.533.¹⁰

Namun, setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia, prestise Banten merosot tajam karena perebutan kekuasaan di antara keluarga Sultan yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk memperluas pengaruh mereka dalam mengintervensi kesultanan. Peristiwa tahun 1682 di mana Belanda mengirim pasukan ke Banten pada bulan Maret telah lama dianggap sebagai titik krusial dalam sejarah Banten karena hilangnya kemerdekaan diplomatik kesultanan dan basis kemakmuran ekonominya.¹¹ Kesultanan yang besar tersebut akhirnya runtuh pada tahun 1808 ketika ia akhirnya berada di bawah kekuasaan Belanda di bawah perintah Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808-1811). Namun, Williams berpendapat bahwa walaupun kesultanan dianeksasi oleh Belanda pada tahun 1808, mereka tetap mempertahankan sultan sebagai penguasa boneka hingga tahun 1832.¹² Di bawah pemerintah kolonial Belanda, Banten menjadi wilayah yang terpinggirkan dan tidak lagi menjadi pusat perdagangan yang penting. Beberapa wilayahnya, seperti Lebak bahkan menjadi salah satu daerah yang paling miskin di pulau Jawa. Kondisi tersebut terus terjadi hingga masa Orde Baru yang semakin memarjinalkan Banten dan bahkan ia menjadi daerah buangan bagi para pejabat Jawa Barat yang dianggap membangkang atau tidak produktif bagi pembangunan.

Interaksi Pedagang dan Nelayan Mancanegara dan Nusantara dengan Orang Banten

Tomé Pires, seorang ahli obat-obatan dari Lisbon yang menghabiskan waktunya di Malaka dari tahun 1512 hingga 1515 mengunjungi Jawa dan Sumatera dan dengan sangat tekun mengumpulkan informasi dari orang-orang mengenai seluruh daerah Malaya-Indonesia. Menurut Pires, penduduk daerah Jawa Barat yang berbahasa Sunda belum menganut agama Islam, bahkan mereka justru memusuhinya. Islam masih dianggap sebagai sesuatu yang asing dan mengancam tradisi-tradisi lokal. Daerah tersebut adalah wilayah yang

¹⁰ Nina Lubis, *Banten dalam Lintasan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara* (Jakarta: LP3ES, 2004), 78.

¹¹ Atsushi, *Changes of Regime*, 18; Suharto, “Banten dalam Masa Revolusi 1945-1949: Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Disertasi--Universitas Indonesia, 2001), 5.

¹² Williams, *Communism*, xxvii.

berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, termasuk Banten.¹³ Namun, Pires tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kondisi Banten saat itu sebagai sebuah pelabuhan yang berada di bawah Kerajaan Sunda.

Di sebagian besar wilayah luar Jawa, kerajaan-kerajaan terbentuk di daerah pantai yang cocok untuk pertanian padi. Namun, jalur komunikasi yang terpenting bagi negara-negara seperti itu adalah jalur yang menuju ke luar, yaitu ke arah laut. Hal itu pulalah yang membuat etnis Bugis dari Sulawesi Selatan memulai emigrasi besar-besaran pada abad ke-17 dan 18. Mereka tidak bergerak ke utara di dalam pulau mereka sendiri, tetapi justru memilih perahu untuk melakukan pelayaran. Bagi pulau-pulau luar Jawa, lautan adalah jalan raya mereka. Orang-orang Bugis ini memilih Banten sebagai salah satu wilayah tujuan emigrasi mereka.¹⁴

Tidak ada sumber sejarah yang secara jelas menyebutkan kapan pertama kalinya orang-orang Bugis datang ke Banten. Diperkirakan mereka datang dalam rombongan besar ketika Banten menjadi kesultanan besar di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, mungkin bersamaan dengan masa ketika ulama terkemuka Sulawesi Selatan, Syaikh Yusuf, mulai menetap di Banten di paruh pertama abad ke-17. Seorang penulis, Abu Hamid, berpendapat bahwa reputasi Syaikh Yusuf mampu menarik perhatian orang-orang dari luar Jawa, termasuk orang Bugis untuk menuntut ilmu agama kepadanya. Selain itu, merujuk kepada sumber-sumber Belanda, Hamid juga menyebutkan bahwa setelah Sultan Ageng Tirtayasa wafat, perang gerilya antara Kesultanan Banten dan VOC dilanjutkan oleh Syaikh Yusuf, Pangeran Purbaya, dan Pangeran Kidul. Syaikh Yusuf memimpin kurang lebih 5.000 tentara, termasuk lebih dari 1.000 tentara yang terdiri dari orang-orang Makassar, Bugis, dan Melayu. Penjelasan ini menunjukkan bahwa orang Bugis dan juga Makassar sudah banyak yang menetap di Banten dan menjadi tentara Kesultanan Banten serta berperang melawan VOC pada waktu itu.¹⁵

Namun, dalam masa-masa sesudahnya tidak ada lagi catatan sejarah yang menyebutkan sepak-terjang orang Bugis di Banten. Sebuah penelitian terkini tentang etnis Bugis di Banten menyebutkan

¹³ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: Serambi, 2010), 11-12.

¹⁴ *Ibid.*, 29-30.

¹⁵ Abu Hamid, *Syaikh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi, dan Pejuang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 103.

bahwa orang-orang Bugis yang kini menetap di Kampung Bugis, Kelurahan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten pertama kali datang pada tahun 1965. Berdasarkan memori kolektif mereka, disebutkan bahwa pada mulanya hanya ada enam orang saja yang datang ke Banten, yaitu Aras, Gala, Siri, Made, Merali, dan Bedu. Mereka datang ke Banten sebagai nelayan. Setelah merasa nyaman tinggal di sana, mereka mulai hidup menetap dan membawa serta sanak keluarga mereka. Menetapnya mereka di Banten menunjukkan kesesuaian dengan tradisi mereka bahwa jika ada suatu daerah yang dapat mendatangkan rejeki, mereka akan menetap dan tinggal selamanya di sana. Kedatangan orang-orang Bugis selanjutnya terjadi dalam beberapa gelombang, yaitu pada tahun 1972, 1974, dan 1975. Hingga kini, berdasarkan data dari kelurahan setempat, pada tahun 2013 tercatat populasi orang Bugis di Karangantu berjumlah 4.324 jiwa, terdiri dari 2.112 jiwa laki-laki dan 2.212 jiwa perempuan.¹⁶

Sama halnya dengan kedatangan orang Bugis ke Banten, kedatangan orang Lampung dan orang Cirebon juga tidak terdokumentasi dengan baik. Walaupun pernah menjadi daerah koloni Banten dan merupakan salah satu daerah penghasil lada utama bagi Kesultanan Banten,¹⁷ sumber-sumber tertulis tentang hubungan Banten dan Lampung tidak banyak diketahui, terlebih lagi tentang keberadaan orang-orang Lampung di Banten, terutama di Karangantu. Kini sebagian besar orang Lampung di Banten menetap di Kampung Cikoneng, Kampung Bojong, Kampung Tegal, dan Kampung Salatluruh di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Orang-orang Lampung di Banten ini bisa dikatakan memiliki identitas ganda. Salah satu indikasinya adalah bahwa pada gerbang/gapura kantor Kepala Desa Cikoneng ada tulisan yang berbunyi “Kami orang Banten, kami menjunjung tinggi leluhur kami, Lampung”. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyadari bahwa mereka beretnis Lampung, tetapi mereka bukan orang Lampung (secara geografis), karena mereka adalah orang Banten. Mereka juga menolak dikatakan sebagai pendatang.¹⁸

¹⁶ Wazin dkk., “Etnis Bugis di Banten: Kajian tentang Orang Bugis di Kampung Bugis Karangantu” (Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), 34-43.

¹⁷ Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten*, 112; Tjandrasasmita, *Sultan Ageng Tirtayasa*. Jakarta: Depdikbud, 1981/1982), 323.

¹⁸ Endad Musaddad, dkk., *Etnis Lampung di Banten* (Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), 14, 35.

Sementara itu, sejak awal berdirinya Kesultanan Banten, orang-orang Cirebon bersama-sama dengan orang-orang asing lainnya dari Gujarat, Mesir, Turki, dan Tiongkok memiliki perkampungan sendiri di sebelah barat Pasar Karangantu dan di sebelah barat Masjid Banten. Dalam tradisi Cirebon, peranan Sunan Gunung Jati sebagai pendiri Kesultanan Banten sangat menonjol. Selain itu, orang-orang Cirebon juga membantu Banten dalam menaklukkan Kerajaan Sunda pada tahun 1579. Pada masa Maulana Yusuf (1570-1580) perdagangan Banten sangat maju dan bahkan Banten dapat dianggap sebagai sebuah kota pelabuhan emporium tempat barang-barang dagangan dari berbagai penjuru dunia digudangkan dan kemudian didistribusikan. Pada masa itu, situasi di Karangantu sangat ramai. Pedagang dari Tiongkok membawa barang dagangan berupa porselen, sutra, beludru, benang emas, jarum, dan lain-lain. Pedagang Persia dan Arab menjual permata dan obat-obatan. Pedagang dari Gujarat menjual kain dari bahan kapas dan sutra. Sementara itu, pedagang Portugis membawa barang dagangan berupa kain dari India. Para pedagang dari Nusantara, seperti dari Cirebon, Makassar, Sumbawa, Palembang, Maluku, dan lain-lain membawa barang dagangan dari daerahnya masing-masing, seperti garam, gula, beras, ikan kering, rempah-rempah, dan lain-lain.¹⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak lama Banten telah menjadi daerah kosmopolitan yang mempertemukan pedagang dari berbagai penjuru dunia untuk mengadu nasib di sana. Pada masa sekarang, pelabuhan Karangantu tidak lagi menjadi pelabuhan kosmopolitan seperti pada masa kesultanan. Namun, setelah Indonesia merdeka, setidaknya orang-orang 'asing' dari berbagai daerah di Indonesia masih ada yang menetap dan bergantung sepenuhnya pada pelabuhan yang pernah sangat termasyhur pada abad ke-17 dan 18 tersebut. Bagaimana kondisinya kini pada masa desentralisasi yang seharusnya diharapkan pemberian otonomi daerah bagi Banten sebagai sebuah provinsi yang berdiri pada tahun 2000 dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Pelabuhan Karangantu? Bagaimana pula dinamika antaretnis yang terjadi di sana yang kini tidak sekosmopolis pada masa Kesultanan Banten? Untuk menjawabnya, di bawah ini akan dijelaskan kondisi desentralisasi di Indonesia secara umum.

¹⁹ Halwany Michrob dan Mudjahid Chudari, *Catatan Masalalu Banten* (Serang: Saudara, 1993), 82-83.

Kebijakan Desentralisasi

Demokratisasi dan desentralisasi adalah dua proses yang terus berjalan dan berkembang di Indonesia. Keduanya muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralisasi dan proses demokrasi yang tidak berfungsi dengan baik pada masa Orde Baru. Keduanya adalah konsep yang perlu dipahami dalam menjelaskan dinamika antaretnis di Karangantu. Edward Aspinall dan Greg Fealy menjelaskan aspek-aspek hubungan antara pusat dan daerah pada masa pasca-Orde Baru dan menunjukkan bahwa kemunculan kekuatan lokal telah mempengaruhi seluruh aspek politik, ekonomi dan masyarakat Indonesia.²⁰

Proses desentralisasi di Indonesia tidaklah sama dengan proses demokratisasi. Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken menginvestigasi peranan elit daerah, terutama dalam bidang birokrasi, ekonomi, dan politik identitas pada masa pasca-Suharto. Argumen utama dalam karya mereka adalah bahwa desentralisasi tidak semata berujung pada demokratisasi, tata laksana pemerintahan yang baik, dan penguatan masyarakat madani di tingkat daerah. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa yang lazim terjadi adalah desentralisasi korupsi, kolusi, dan kekerasan politik yang dulunya hanya umum terjadi pada masa Orde Baru, dan sekarang dialihkan kepada pola-pola patrimonial di tingkat daerah.²¹

Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, sebuah era desentralisasi menggantikan periode sentralisasi lama yang mengabaikan otonomi daerah. Menurut Schulte Nordholt dan Van Klinken, ciri khas identitas etnik dan keagamaan adalah sifat provinsi di Indonesia yang paling menonjol setelah runtuhnya Orde Baru. Etnisitas telah menjadi ideologi dalam perjuangan politik dan di saat yang bersamaan, ia juga telah membangkitkan perasaan yang mendalam.²²

²⁰ Edward Aspinall dan Greg Fealy, "Introduction: Decentralisation, Democratisation and the Rise of the Local", Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), 2.

²¹ Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, "Introduction", Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (eds.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Subarto Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 2007), 18.

²² *Ibid.*, 21.

Desentralisasi telah mengubah pemerintahan Indonesia dari negara sentralistik dengan institusi dan prosedur yang seragam menjadi wilayah yang sangat beragam di kabupaten/kota dengan berbagai budaya politik. Akibatnya, *pertama*, keprihatinan yang diungkapkan oleh beberapa politisi bahwa desentralisasi akan menyebabkan disintegrasi teritorial dan kekacauan administratif belum terwujud. *Kedua*, kualitas pemerintah daerah belum membaik di seluruh dewan, meskipun ini adalah alasan resmi untuk desentralisasi.²³ Implementasi desentralisasi pasca-Orde Baru telah menghasilkan hubungan pusat-pinggiran yang stabil meski jauh sebelum di era Sukarno, ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang desentralisasi utama pada bulan Desember 1956, negara melihat banyaknya gelombang pemberontakan daerah, dan bahkan ketika Soeharto memegang kekuasaan secara menyeluruh, perubahan di tingkat lokal diramalkan ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar No. 5/1974 sebagai upaya perubahan konstitusional untuk memberikan lebih banyak tanggung jawab di tingkat-tingkat di bawah tingkat nasional, di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.²⁵

Desentralisasi diperkirakan memiliki potensi untuk memperbaiki rancangan proyek yang sesuai konteks, sasaran penerima manfaat, dan pertanggungjawaban kepada penduduk lokal.²⁶ Secara umum, desentralisasi adalah, dari perspektif politik, fundamental untuk demokrasi itu sendiri. Kenyataannya, modus kekuasaan negara yang didirikan di bawah Orde Baru berlanjut meskipun rezim yang melahirkannya dan perubahan kelembagaan yang mengikutinya sudah tiada. Dengan kata lain, terlepas dari diperkenalkannya pemilihan yang bebas dan adil dan devolusi otoritas politik, “elit lama” telah mempertahankan posisi strategis administratif dan politik mereka di

²³ Marcus Mietzner dan Edward Aspinall, “Problems of Democratisation in Indonesia: An Overview”, Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (eds.), *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions, and Society* (Singapore: ISEAS, 2010), 15-16.

²⁵ Ronald L. Holzhaecker, Rafael Wittek, dan Johan Woltjer, “Decentralization and Governance for Sustainable Society in Indonesia”, Ronald L. Holzhaecker, Rafael Wittek, dan Johan Woltjer (eds.), *Decentralization and Governance in Indonesia* (Cham (etc): Springer, 2016), 5.

²⁶ Aniruddha Dasgupta dan Victoria A. Beard, “Victoria A. ‘Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia’”, *Development and Change*, Vol. 38, No. 2 (2007), 231.

tingkat nasional, provinsi, dan lokal.²⁸ Namun, juga benar bahwa di saat “elit lama” tetap berkuasa, lingkungan kelembagaan yang baru telah merombak posisi mereka untuk semakin sulit mempertahankan kekuasaannya.²⁹

Presiden Habibie menghasilkan dua undang-undang yang sangat penting dalam proses desentralisasi di Indonesia, yaitu UU No. 22/1999 yang berhubungan dengan pendelegasian kewenangan politik dan UU No. 25/1999 yang mengatur urusan keuangan yang menguntungkan daerah yang pada akhirnya memulai era baru desentralisasi yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001.³⁰ Di bawah suasana politik baru, pemerintah pusat diharuskan menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam semua bidang, kecuali bidang hubungan luar negeri; pertahanan dan keamanan; kebijakan keuangan; hukum; dan agama.³¹ Namun, implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi tidak akan berjalan baik kecuali ada usaha-usaha untuk mendorong terbentuknya partai-partai politik di daerah yang akan mendorong terbentuknya integrasi dan persatuan negara.³²

Megawati, penerus Habibie dan Abdurrahman Wahid, mengeluarkan dua undang-undang baru yang menandai pentingnya pemerintah daerah, yaitu UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut sangat meningkatkan kemungkinan putra daerah non-militer untuk memegang jabatan kepala daerah, karena

²⁸ Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, “The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia”, Michele Ford dan Thomas Pepinsky (eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2004), 29.

²⁹ Michael Buehler, “Local Elite Reconfiguration in Post-New Order Indonesia: The 2005 Election of District Government Heads in South Sulawesi”, *RIMA*, Vol. 41, No. 1 (2007), 119.

³⁰ Nordholt dan Klinken, “Introduction”, 12; Aspinall dan Fealy, “Introduction”, 3.

³¹ Aspinall dan Fealy, “Introduction”, 3-4; Marcus Mietzner, “Indonesia’s Direct Elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy”, Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds.), *Soeharto’s New Order and its Legacy* (Canberra, ANU E Press, 2010), 176.

³² Baladas Ghoshal, “Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia”, *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 26, No. 3 (2004), 524; Ben Hillman, “Ethnic Politics and Local Political Parties in Indonesia”, *Asian Ethnicity*, Vol. 13, No. 4 (2012), 419.

undang-undang tersebut berarti bahwa kepala daerah akan dipilih secara langsung oleh pemilih. Pemilihan langsung pertama (dipilih oleh rakyat dan bukan oleh DPRD) untuk posisi kepala daerah berlalu dengan lancar di puluhan kabupaten pada bulan Juni 2005. Orang-orang dapat memilih kandidat yang mereka kenal dan percaya, daripada mengandalkan parlemen daerah. Pemilu langsung juga menyelesaikan proses liberalisasi pemilihan yang dimulai setelah jatuhnya Suharto.³³ Yang juga tidak boleh kita lupakan adalah bahwa pemilihan langsung menimbulkan konsekuensi lain, terutama dalam proses nominasi. Kader partai politik di tingkat lokal pada umumnya tidak cukup makmur untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, mengingat tingginya biaya yang diberikan oleh lingkungan politik yang lebih demokratis terhadap kandidat. Akibatnya, banyak tokoh kaya dari luar partai politik bersaing untuk mendapatkan nominasi sebelum pemilihan.³⁴ Hal ini mengindikasikan tidak adanya disiplin partai di Indonesia, terlepas dari upaya pimpinan pusat partai untuk mengendalikan kekuatan sentrifugal tersebut melalui sentralisasi struktur pengambilan keputusan partai internal.³⁵

Bupati dan walikota pada masa Orde Baru dipilih secara formal oleh DPRD II, sedangkan keputusan yang sebenarnya dibuat (direstui dalam retorika politik Indonesia) oleh pemerintah pusat. Ketika Orde Baru runtuh, pada mulanya DPRD II lah yang memilih bupati dan walikota. Namun, dalam perkembangan selanjutnya ketika pemilihan langsung diperkenalkan, rakyatlah yang memilih pemimpinnya. Kebijakan desentralisasi ini telah membuat “putra daerah” memiliki peran penting dalam menduduki posisi birokrasi yang strategis.

Kini telah dua dekade Indonesia memasuki masa pasca-Orde Baru, dan ada banyak perubahan dramatis dalam konstelasi politik Indonesia. Pada masa transfer kekuasaan tersebut bangsa Indonesia telah berusaha memformulasikan dan mengimplementasikan reformasi menyeluruh yang berusaha mendemokratisasikan dan memperbaiki sistem pemerintahan, sekaligus menyembuhkan luka-luka yang ditinggalkan oleh Orde Baru pada masyarakat di daerah yang sering termarginalisasi. Salah satu caranya adalah dengan

³³ Nordholt dan Klinken, “Introduction”, 14-15; Mietzner, “Indonesia’s Direct Elections”, 174.

³⁴ Michael Buehler dan Paige Tan, “Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province”, *Indonesia*, Vol. 84 (2007).

³⁵ Buehler, “Local Elite Reconfiguration”.

menerapkan desentralisasi fungsi pemerintahan. Ironisnya, ketika proses reformasi terus berjalan, sebuah “fitur patologis” pemerintahan sebelumnya, yaitu patronase, nampak telah menjadi karakter era pasca-Orde Baru.³⁶ Pola patronase tersebut tidaklah statis karena ia telah dipengaruhi oleh proses *state-building* dan, oleh hal yang sama, ia telah mempengaruhi proses tersebut. Dalam beberapa hal, patronase diwariskan dari Orde Baru, sedangkan akarnya dapat dilacak hingga masa pra-kolonial. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah *changing continuity* (kesinambungan yang berubah) yang akan membantu menjelaskan masalah-masalah yang terhubung dengan desentralisasi dan pembentukan otonomi daerah.³⁷

Pola dan Bentuk Hubungan Antaretnis di Banten

Pada masa Orde Baru, rezim Suharto menegaskan pembagian etnis antara yang berkuasa dan yang dikuasai di Banten. Orang Sunda banyak memegang jabatan penting dalam bidang administratif dan juga militer, termasuk bupati, sekretaris daerah, dan komandan militer. Namun, kebijakan pemerintah Orde Baru ini sebenarnya meniru kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengangkat pejabat di Banten yang berasal dari luar Banten.³⁸ Perbedaan adat dan tradisi sering menjadi alasan bagi pengucilan etnis tertentu dan juga pembenaran bagi terciptanya kekerasan etnis.³⁹ Namun, secara umum di Indonesia afiliasi etnis tidaklah terlalu berperan besar dalam kehidupan politik sehari-hari.⁴⁰

Penelitian lapangan untuk tulisan ini menunjukkan bahwa orang Bugis, Lampung, dan Cirebon di Karangantu yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan masih mempertahankan adat-istiadat dan

³⁶ Jamie Mackie, “Patrimonialism: The New Order and Beyond”, Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds.), *Soeharto’s New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch* (Canberra: ANU E Press, 2010), 82-83.

³⁷ Henk Schulte Nordholt, “Decentralisation in Indonesia: Less State, More Democracy?”, John Harriss, Kristian Stokke, dan Olle Törnquist (eds.), *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation* (Basingstoke [etc.]: Palgrave Macmillan, 2004), 30-31.

³⁸ Yanwar Pribadi, “Jawara in Banten: Their Socio-Political Roles in the New Order Era 1966-1998” (Tesis--Leiden University, 2008), 1.

³⁹ David Henley dan Jamie S. Davidson, “In the Name of Adat: Regional Perspectives on Reform, Tradition, and Democracy in Indonesia”, *Modern Asian Studies*, Vol. 42, No. 4 (2008), 818.

⁴⁰ Edward Aspinall, “Democratization and Ethic Politics in Indonesia: Nine Theses”, *Journal of East Asian Studies*, Vol. 11 (2011), 289-290.

tradisi mereka. Mereka menyadari asal-usul mereka sebagai orang yang berasal dari luar Banten. Namun, setelah sekian lama menetap di Banten dan memiliki keturunan, mereka menganggap bahwa Banten adalah tempat tinggal mereka yang harus dijaga, dipertahankan, dan dijadikan sebagai pembentuk identitas mereka. Dalam hal ini, mereka memiliki sikap yang terbuka dan non-eksklusif dalam berinteraksi dengan komunitas etnis lainnya yang ada di Karangantu. Hal yang agak sedikit berbeda berlaku bagi orang Cirebon di mana hubungan dengan daerah asal mereka masih tetap dipertahankan secara intensif, salah satunya adalah dengan tetap sering mengunjungi kampung halaman mereka dan membawa serta kerabat mereka ketika dibutuhkan pada waktu musim melaut.

Gambaran Banten sebagai daerah dengan corak dan tradisi keislaman yang kuat membuat orang Bugis, Lampung, dan Cirebon mengidentifikasi diri mereka dengan kebudayaan Banten. Penerimaan syariat Islam menjadi salah satu bagian penting dalam *panngaderreng*, sistem kebudayaan Bugis yang menjadikan Islam sebagai salah satu simbol identitas penting kebudayaan Bugis. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika orang Bugis pada umumnya menganggap bahwa secara normatif orang Bugis haruslah beragama Islam. Karena itu, jika ada orang Bugis yang tidak beragama Islam maka ia dianggap menyalahi kecenderungan umum, dan dianggap bukan lagi sebagai orang Bugis dalam arti yang sesungguhnya. Pandangan ini dipegang teguh secara umum di kalangan orang Bugis di Karangantu sebagai konsekuensi dari penerimaan syariah dan sebagai bagian integral dari *panngaderreng*. Oleh karena itu, agama selain Islam kurang berkembang di kalangan orang Bugis di manapun.⁴¹

Bagi orang Bugis, adat menempati posisi sentral dalam kehidupan sehari-hari. Adat yang tercermin dalam kebiasaan hidup orang Bugis membentuk pandangan serta pola hidup sehari-hari yang mencakup proses-proses sosial seperti hubungan antarindividu dan kelompok, hak-hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, pola-pola interaksi sosial, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kebanyakan komunitas etnis lainnya di Indonesia yang tetap memegang teguh adat mereka di manapun mereka tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Dalam tradisi orang Bugis di Banten, orang yang sudah berhaji mendapatkan kedudukan yang terhormat di masyarakat, meskipun

⁴¹ Wazin dkk., "Etnis Bugis di Banten", 3.

tampilan rumahnya sederhana. Hal tersebut dapat dilihat, misalnya, dalam upacara-upacara pernikahan di mana orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji ditempatkan di barisan paling depan. Selain itu, kebiasaan orang Bugis juga menempatkan perempuan yang belum menunaikan ibadah haji untuk mengurus makanan atau bertugas di dapur pada acara pesta pernikahan. Oleh karena itu, ada kecenderungan bagi perempuan Bugis di Banten untuk segera menunaikan ibadah haji agar tidak lagi ditempatkan di dapur dalam upacara pernikahan. Identifikasi yang kuat dengan Islam menunjukkan bahwa tradisi keislaman orang-orang Bugis juga sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi pada komunitas etnis Bugis sudah berlangsung cukup lama dan melekat kuat di dalam seluruh kehidupan mereka.

Selain dalam hal persamaan mata pencaharian sebagai nelayan, ada beberapa tradisi di kalangan orang Bugis di Banten yang seringkali berhubungan dengan orang Banten dan orang-orang dari etnis lainnya. Salah satunya adalah ritus siklus hidup sejak mengandung hingga melahirkan. Tidak seperti orang Banten, orang Bugis di Banten tidak melaksanakan tradisi tujuh bulanan (*nujubulan*) karena mereka menganggap hal tersebut tidak terlalu penting. Setelah melahirkan, sang anak biasanya akan diaqiqahkan, dan ini berarti sebuah pesta besar yang melibatkan banyak orang, tidak hanya dari etnis Bugis saja, melainkan dari etnis lain. Dalam ritus pernikahan, tidak sedikit orang Bugis yang menikah dengan etnis lainnya, terutama dengan orang Banten. Biasanya ketika ada pernikahan beda etnis, kedua belah pihak tidak terlalu mempermasalahkan tentang upacara adat pernikahan mana yang akan dilaksanakan. Dalam ritus kematian, berbeda dengan orang Banten, orang Bugis di Karangantu tidak melaksanakan tahlilan. Mereka hanya melaksanakan pengajian pada malam hari setiap sesudah magrib. Ada yang mengatakan bahwa pengajian tersebut dilakukan selama satu minggu dan harus hingga tamat membaca al-Qur'an. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pengajian tersebut harus tamat membaca al-Qur'an tiap malamnya selama satu minggu.⁴²

Sebagai penganut agama Islam, keberadaan orang Lampung di Banten juga sering menimbulkan interaksi sosial dengan orang Banten. Mayoritas orang Lampung di Banten menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah atau pesantren di sekitar rumah mereka. Dalam perayaan Idul Fitri, Idul Adha, dan perayaan hari-hari besar

⁴² Ibid., 135-145.

keagamaan Islam lainnya, orang Lampung sering mempertunjukkan kesenian mereka, seperti Tari Sembah. Orientasi ke daerah asal masih tetap ada dan ditunjukkan melalui adanya komunitas Lampung Banten yang bernama *Lampung Say* (Lampung Satu). Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan orang Lampung dan untuk mempertahankan serta melestarikan adat dan tradisi orang Lampung dan orang Banten. Organisasi ini menunjukkan bahwa ada bentuk akulturasi yang kuat antara orang Lampung dan daerah di mana mereka tinggal. Selain itu, dalam hal bahasa sehari-hari, selain menggunakan bahasa Lampung, mayoritas orang Lampung di Banten juga menggunakan bahasa Sunda Banten dan bahasa Jawa Banten ketika berkomunikasi dengan orang Banten.⁴³

Dalam beberapa ritus siklus hidup, seperti ritus kematian, orang Lampung juga seringkali berinteraksi dengan orang Banten. Tidak seperti orang Bugis yang tidak melaksanakan tahlilan, orang Lampung di Banten melaksanakan tahlilan dan *riungan* (kumpulan). Acara tahlilan tersebut biasanya dilaksanakan pada hari pertama hingga hari ketujuh dengan mengundang tetangga terdekat dari etnis manapun. Pelaksanaan tahlilan di kalangan orang Lampung di Banten tidaklah mengejutkan mengingat Lampung pernah menjadi bagian dari Kesultanan Banten, sehingga tradisi keagamaan orang Lampung sebagian besar mengikuti tradisi keagamaan orang Banten.

Sementara itu, adat-istiadat dan tradisi yang hampir sama antara orang Banten dan orang Cirebon membuat keduanya hampir tidak dapat dibedakan. Mayoritas orang Banten di Karangantu berbahasa Jawa dialek Banten, dan dialek ini juga hampir sama dengan bahasa Jawa dialek Cirebon yang dituturkan oleh orang Cirebon. Tidak seperti orang Bugis dan orang Lampung yang mungkin jarang atau bahkan tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah leluhur mereka, orang Cirebon yang menjadi nelayan di Karangantu seringkali mengunjungi tanah leluhur mereka. Seringkali ketika mereka kembali lagi ke Banten, mereka membawa serta sanak saudara mereka untuk menjadi nelayan musiman di Karangantu. Keberadaan mereka yang mengelompok, sama dengan orang Bugis dan orang Lampung, sangat jelas menunjukkan bahwa mereka juga memperlihatkan identitas etnisitas mereka secara nyata. Namun, hal tersebut tidak lantas berarti bahwa mereka menunjukkan eksklusivitas mereka. Dalam banyak hal, orang Cirebon menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap

⁴³ Musaddad, dkk., *Etnis Lampung*, 72-74.

adat dan tradisi orang Banten dengan salah satu indikasinya adalah pernikahan antara mereka dengan orang Banten.

Orang Bugis, Lampung, maupun Cirebon yang sudah lama atau baru saja menetap di Karangantu memiliki sebuah tradisi bersama yang dilakukan dengan orang Banten pada waktu-waktu tertentu. Tradisi tersebut bukanlah tradisi ritus siklus hidup, melainkan tradisi *rumatan laut* atau *nadran*. Tradisi ini mempersatukan komunitas nelayan yang ada di Karangantu. *Nadran* atau pesta laut diadakan setahun sekali dan diikuti oleh seluruh nelayan tanpa melihat perbedaan asal-usul. Acara ini adalah bentuk ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah atau sebagai bentuk doa bersama agar para nelayan diberikan keselamatan ketika melaut. Acara ini, selain ditandai oleh adanya kegiatan ritual yang bersifat keagamaan, juga ditandai oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat mistis dan hiburan. Dari aspek mistis, pemotongan kerbau dan pelarungan kepala kerbau di laut untuk meminta keselamatan merupakan salah satu pertanda adanya tradisi sinkretik di kalangan nelayan di pulau Jawa karena tradisi ini juga dapat ditemukan di berbagai daerah di pulau Jawa. Dari aspek hiburan, tradisi ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah setempat, dan seringkali ia menjadi ajang budaya yang dikemas sebagai sebuah acara pariwisata yang ditandai dengan acara-acara hiburan pentas musik dan kesenian lainnya, seperti wayang kulit atau wayang golek. Tidak jelas sejak kapan tradisi *nadran* ini ada di Banten, dan juga tidak jelas sejak kapan acara ini melibatkan komunitas etnis lainnya. Latar belakang etnis yang berbeda dapat dikatakan tidak lagi menjadi perbedaan ketika acara ritual masyarakat maritim ini dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam kondisi khusus, ritual ini bahkan dapat dilaksanakan lebih dari setahun sekali, terutama ketika kondisi cuaca di laut sedang buruk dan oleh karena itu para nelayan membutuhkan perlindungan dari penguasa alam untuk keselamatan mereka.

Dalam aspek sosial-budaya, keberadaan komunitas-komunitas etnis yang berbeda-beda tersebut tidak membuat masyarakat pesisir Karangantu menjadi terpolarisasi. Walaupun mereka tetap mempertahankan beberapa tradisi yang dibawa dari tanah asal mereka dan mengembangkan beberapa tradisi yang cukup berbeda dengan tanah asal, tetapi secara umum, para pendatang ini lebih merasa sebagai orang Banten dan berakulturasi dengan kebudayaan setempat. Dalam aspek ekonomi, kesamaan profesi sebagai nelayan tidak

membuat mereka menjadi pesaing satu sama lain. Mereka saling melengkapi—walaupun tidak selalu bekerjasama—dalam tradisi besar masyarakat pesisir, baik sebagai nelayan, pemilik kapal, pemilik modal, maupun pedagang ikan.

Secara umum, tidak seperti kondisi di beberapa wilayah di Kalimantan yang sering memiliki konflik antaretnis, terutama antara orang Madura dan orang Dayak, atau di Maluku yang juga pernah ditandai oleh konflik antaretnis antara warga Muslim yang sebagian melibatkan etnis pendatang dari Sulawesi dan warga Kristen yang didominasi oleh orang Maluku, di Karangantu hampir tidak pernah ada perselisihan besar yang mempertentangkan etnis-etnis yang mencari nafkah sebagai nelayan. Jikapun ada perselisihan, maka itu adalah perselisihan antarindividu, bukan perselisihan antaretnis, apalagi perselisihan karena perberbedaan pandangan dalam masalah keagamaan. Dalam hal ini, dinamika antaretnis di Karangantu pada masa desentralisasi merefleksikan apa yang terjadi pada masa Kesultanan Banten ketika menjadi daerah kosmopolitan yang mempertemukan bangsa-bangsa dari berbagai penjuru dunia. Artinya, Karangantu tetap menjadi daerah kosmopolis yang mempertemukan beragam komunitas etnis dari berbagai tempat di Indonesia. Namun, tidak seperti pada masa kesultanan ketika Pelabuhan Karangantu adalah sebuah pelabuhan perdagangan besar yang dikenal dan dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Eropa dan Asia, kini ia hanya menjadi tempat pelabuhan ikan dan menjadi kampung nelayan saja. Selain itu, kini tidak ada lagi kehadiran pedagang mancanegara yang membawa barang-barang dagangan dari seluruh dunia, apalagi hingga menetap di sana.

Kebijakan Desentralisasi dan Perkembangan Dunia Maritim Indonesia dan Banten

Hubungan antardaerah di Indonesia setelah diberlakukannya otonomi daerah memperlihatkan sisi yang berbeda dibandingkan pada masa Orde Baru. Pada masa kekuasaan Soeharto, daerah diminta untuk mensukseskan program-program pembangunan pusat, dan oleh karena itu daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak diharapkan untuk saling bersaing. Namun, sejak era desentralisasi dimulai, dinamika hubungan antardaerah memasuki babak baru. Daerah diberikan kewenangan yang besar untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi dirinya sendiri untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Namun, tampaknya pemerintah pusat tidak berkaca pada sejarah. Dalam pidato pengukuhan guru besar tetapnya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2006, Susanto Zuhdi merujuk pada karya John Tucker tentang usaha pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam mempersatukan kepulauan dari Sabang sampai Merauke melalui kapal *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) yang berlayar dari ujung barat dan timur ke segenap penjuru wilayah yang disebut *Pax Neerlandica*.

Menurut Zuhdi, jika pemerintah kolonial Belanda begitu menganggap penting transportasi laut sebagai upaya menyatukan pulau-pulau di Nusantara, hal sebaliknya justru tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kondisi yang terjadi memperlihatkan bahwa pemerintah pusat membiarkan pelayaran nasional dikuasai oleh pihak asing. Konsekuensinya, pemerintah akhirnya hanya akan melihat kapal asing merajai angkutan laut Indonesia. Hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat A.B. Lopian, “nakhoda” sejarawan maritim Asia Tenggara, yang memandang konsep *archipelago* (kepulauan) Indonesia dari pengertian dasarnya sebagai “laut yang ditaburi sekumpulan pulau”, bukan “pulau yang dipisahkan oleh laut”. Dengan sudut pandang ini, maka pemerintah dapat melihat bahwa acuan lama bangsa-bangsa yang hidup sejak lama di kepulauan Indonesia tentang *archipelago* tidak lagi merujuk kepada negara kepulauan, melainkan sebagai sebuah negara maritim.

Dengan cara pandang yang membuat laut adalah entitas yang terpenting bagi Indonesia, maka dapat dipastikan cara pandang “daratan” akan tergantikan. Konsekuensi logisnya, laut dijadikan sebagai sebuah sistem. Hal ini membuat suatu jaringan yang mengintegrasikan pulau-pulau di Indonesia. Laut bukan lagi sebuah penghalang, tapi sebuah pemersatu, sehingga secara otomatis, pelayaran dan dunia maritim nasional akan bangkit kembali. Dalam hal Karangantu, pelabuhan tersebut kemungkinan besar dapat kembali menjadi pelabuhan kosmopolis besar yang menjadi pusat perdagangan internasional seperti pada masa Kesultanan Banten.

Salah satu indikasi lain bagaimana pemerintah pusat dapat menghindari kesalahan cara pandang dalam melihat konsep *archipelago* adalah dengan merujuk pada kebijakan negara-negara maritim besar di dunia, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Keduanya berorientasi maritim dan mementingkan perdagangan ke daerah seberang laut, bukan ke dalam negara mereka sendiri. Amerika Serikat begitu tertarik

dengan ide brilian Alfred Thayer Mahan (1840-1914) yang menulis tentang *The Influence of Sea Power upon History 1660-1783* pada tahun 1890, sehingga pada akhir abad ke-19 mereka mulai membangun angkatan lautnya secara besar-besaran. Politik ekspansi menyeberangi lautan yang mulai dianut Amerika Serikat waktu itu dapat dicocokkan dengan teori kekuatan laut Mahan, sehingga pemerintah mendapat dukungan rakyat untuk melaksanakan politik ini. Bahkan, pengaruh Mahan ini berlanjut ke negara-negara lain. Di Jerman, Jepang, Prancis, Italia, Rusia, dan Spanyol terjadi dorongan yang kuat untuk membangun kekuatan lautnya. Sementara itu, Inggris bahkan sudah lama menjadi kekuatan besar dunia maritim ketika antara abad ke-17 dan 20 ia mampu menjelajahi hampir seluruh pelosok dunia dan memperoleh keuntungan yang luar biasa besarnya, baik dari perdagangan yang adil dan jujur, maupun melalui kolonialisme. Inggris juga bahkan pernah menjadi salah satu pemain penting dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia, bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, Portugal, Spanyol, Prancis, dan kekuatan-kekuatan Eropa lainnya.

Contoh lain pandangan dunia tentang konsep *archipelago* dan negara maritim berasal dari daerah di antara Eropa, Asia, dan Afrika, yaitu Mediterrania. Mediterrania adalah bukti kompleksitas sistem laut. Ia bukanlah laut tunggal, *it is a complex of seas; and these seas are broken up by islands, interrupted by peninsulas, ringed by intricate coastlines* (ia adalah kumpulan lautan; dan kumpulan ini dipisahkan oleh daratan, diselingi oleh semenanjung, dan dikelilingi oleh garis pantai yang rumit). Demikianlah yang dikatakan Fernand Braudel dalam pengantar bukunya, *The Mediterranean and The Mediterranean World in the Age of Philip II* yang ditulis pada tahun 1972. Kebudayaan Mediterrania begitu maju, termasuk tentunya kehidupan perekonomiannya, karena dianggap sebagai pemersatu tiga benua dan beberapa negara di sekitarnya, bukan dianggap sebagai penghalang yang memisahkan mereka.

Mungkin itu pula pandangan para pelaut Bugis yang lebih dulu menyentuh Australia sebelum James Cook, atau para pelaut Aceh yang sering singgah di India, sehingga dapat dikatakan sebagai penelusuran pelayaran masa lalu. Selain itu, menurut Azyumardi Azra (2003), kemakmuran kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terutama sebagai hasil perdagangan internasional lewat laut, telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Muslim Melayu untuk melakukan

perjalanan ke pusat-pusat keilmuan dan keagamaan di Timur Tengah.⁴⁴ Atau menurut Anthony Reid (1992) perkembangan kota-kota emporium Nusantara di pantai utara Jawa menduduki tempat penting dalam hubungan dengan perkembangan perekonomian Nusantara. Kota-kota pelabuhan tersebut telah berperan sebagai pelabuhan perantara internasional yang menghubungkan Jawa dan daerah produsen rempah-rempah di daerah Kepulauan Maluku yang ada di ujung timur Nusantara dan daerah Nusantara yang ada di ujung barat. Periode ini disebut oleh Reid sebagai masa “kurun niaga” Asia Tenggara.⁴⁵

Selain itu, masih banyak contoh kejayaan masa lalu Indonesia yang berasal dari dunia maritim. Untuk hal tersebut, perlu ditanyakan bagaimana peranan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di setiap daerah. Apakah konsep “pinggiran” dan “pusat” yang memandang laut sebagai pinggiran masih terus dijalankan, sehingga laut dan budaya maritimnya selalu terpinggirkan? Nampaknya ini yang tetap terjadi pada kebijakan dan sistem kelautan yang ada di Banten dan Indonesia secara umum. Di satu sisi, hubungan antaretnis di daerah pesisir Banten adalah hubungan sosial-ekonomi-budaya yang telah telah terjalin lama dan dapat dijadikan sebagai bentuk hubungan multikulturalisme yang ideal. Namun, di sisi lain kebijakan desentralisasi dan kebijakan pemerintah pusat dalam masalah kelautan dan perikanan belum mampu memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan kehidupan perekonomian dan memberdayakan masyarakat nelayan Banten, seperti yang terjadi pada abad ke-16 dan 17.

Walaupun kini Pelabuhan Karangantu tidak lagi menjadi pelabuhan besar seperti pada masa Kesultanan Banten, tetapi pelabuhan ini masih tetap menjadi *melting pot* bagi beberapa etnis Nusantara. Keberadaan orang Bugis, Lampung, dan Cirebon yang berinteraksi dengan sesamanya dan dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa Pelabuhan Karangantu masih tetap menarik perhatian orang-orang dari luar Banten untuk mencari nafkah di sana. Ini adalah sebuah kondisi yang sejatinya dapat membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah merumuskan kebijakan bersama tentang

⁴⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2003).

⁴⁵ Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992).

pentingnya pelabuhan ini, tidak hanya bagi perekonomian Banten dan Indonesia, tetapi juga sebagai sebuah penanda eksistensi keberagaman budaya Nusantara. Kebijakan desentralisasi sesudah tahun 2000 juga adalah sebuah keuntungan bagi pemerintah daerah untuk lebih serius memikirkan dan merumuskan kebijakan yang dapat merevitalisasi Pelabuhan Karangantu menjadi pelabuhan kosmopolis seperti pada masa kesultanan.

Penutup

Peninggalan sejarah berupa bangunan-bangunan besar dapat dengan mudah ditemui dan dikenal dengan baik oleh orang Banten. Situs Banten Lama atau bahkan Banten Girang tidaklah asing bagi orang Banten. Demikian pula dengan situs pra-sejarah seperti situs Lebak Sibedug atau Lebak Kosala. Orang dari luar Banten pun banyak yang mengenalnya. Keraton, masjid, benda pusaka, tradisi, dan juga kepercayaan yang ada pada orang Banten adalah bukti bahwa Banten tidak bisa lepas dari sejarahnya dan menjadi bagian yang integral dari sejarah nasional Indonesia.

Orang Banten biasa hidup dengan tradisi dan tradisi mungkin merasa bersyukur karena di Banten ia dipelihara dengan baik, bahkan bagi sebagian orang, dijadikan pedoman hidup. Terlepas dari sinkretisme atau mungkin hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia, tradisi telah menemukan tempatnya di Banten dan dapat hidup hingga kini. Namun, upaya untuk menghadirkan kearifan masa lalu tampaknya belum bergeser dari wacana romantisme. Pemerintah daerah belum mampu menguak masa lalu itu sendiri menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat, apalagi mengembangkannya dalam konteks pengembangan masyarakat secara keseluruhan.

Banten yang pernah menjadi daerah kosmopolitan hingga kini sebenarnya masih memperlihatkan ciri keragaman tersebut. Setidaknya dua kebudayaan besar, yaitu kebudayaan Sunda dan Jawa hidup berdampingan di Banten sejak ratusan tahun yang lalu. Mayoritas orang Jawa Banten hidup di wilayah utara, seperti Serang dan Cilegon, sedangkan orang Sunda Banten hidup di wilayah selatan, seperti di Lebak dan Pandeglang. Sementara itu, Tangerang menjadi daerah campuran antara orang-orang Sunda, Jawa, Betawi dan komunitas etnis lainnya.

Keberadaan orang Bugis, Lampung, dan Cirebon di Karangantu memperlihatkan bahwa tradisi multikulturalisme masih dapat

ditemukan di Banten. Namun, keberadaan mereka di Banten seringkali tidak dapat berkontribusi secara positif dalam pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya sudah dijelaskan di atas. Namun, yang juga perlu diingat adalah faktor sejarah. Sejarah tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja atau diinterpretasi secara tunggal. Sejarah itu untuk suatu kepentingan, tetapi bukan untuk membenaran atau legitimasi rezim siapa atau kelompok mana, melainkan untuk bangsa Indonesia. Sejak awal pun, pendiri Indonesia sudah menghayati negeri ini. Indonesia adalah bangsa besar dengan jumlah penduduk yang besar dan dengan sumber daya alam yang terbatas dan akan habis. Itu sebabnya mengelola negeri ini dengan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya sejarah, adalah solusi. Sejarah harus menjadi alat untuk mereorientasi sistem kelautan Indonesia dan jalan untuk membangun kembali budaya maritim, sehingga unsur-unsur yang bermata pencaharian hidup dan masyarakat pendukung budaya maritim akan kembali menemukan kejayaannya.

Daftar Rujukan

- Aspinall, Edward dan Fealy, Greg. "Introduction: Decentralisation, Democratisation and the Rise of the Local", Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Aspinall, Edward. "Democratization and Ethic Politics in Indonesia: Nine Theses", *Journal of East Asian Studies*, Vol. 11, 2011.
- Atsushi, Ota. *Changes of Regime and Social Dynamics in West Java: Society, State, and the Outer World of Banten 1750-1830*. Leiden and Boston: Brill, 2006.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ben Hillman, "Ethnic Politics and Local Political Parties in Indonesia", *Asian Ethnicity*, Vol. 13, No. 4, 2012.
- Buehler, Michael dan Tan, Paige. "Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province", *Indonesia*, Vol. 84, 2007.

- Buehler, Michael. "Local Elite Reconfiguration in Post-New Order Indonesia: The 2005 Election of District Government Heads in South Sulawesi", *RIMA*, Vol. 41, No. 1, 2007.
- Dasgupta, Aniruddha dan Beard, Victoria A. "Victoria A. 'Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia'", *Development and Change*, Vol. 38, No. 2, 2007.
- Ghoshal, Baladas. "Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 26, No. 3, 2004.
- Hadiz, Vedi R. dan Robison, Richard. "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia", Michele Ford dan Thomas Pepinsky (eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2004.
- Hamid, Abu. *Syaikh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi, dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Henley, David dan Davidson, Jamie S. "In the Name of Adat: Regional Perspectives on Reform, Tradition, and Democracy in Indonesia", *Modern Asian Studies*, Vol. 42, No. 4, 2008.
- Holz hacker, Ronald L., Wittek, Rafael, dan Woltjer, Johan. "Decentralization and Governance for Sustainable Society in Indonesia", Ronald L. Holz hacker, Rafael Wittek, dan Johan Woltjer (eds.), *Decentralization and Governance in Indonesia*. Cham (etc): Springer, 2016.
- Kartodirdjo, Sartono. *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course, and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966.
- Lubis, Nina. *Banten dalam Lintasan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Mackie, Jamie. "Patrimonialism: The New Order and Beyond", Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds.), *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*. Canberra: ANU E Press, 2010.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1600*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962.
- Michrob, Halwany dan Chudari, Mudjahid. *Catatan Masalalu Banten*. Serang: Saudara, 1993.

- Mietzner, Marcus dan Aspinall, Edward. "Problems of Democratisation in Indonesia: An Overview", Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (eds.), *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions, and Society*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Mietzner, Marcus. "Indonesia's Direct Elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy", Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds.), *Soeharto's New Order and its Legacy*. Canberra, ANU E Press, 2010.
- Musaddad, Endang dkk. *Etnis Lampung di Banten*. Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015.
- Nordholt, Henk Schulte dan Klinken, Gerry van. "Introduction", Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (eds.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Subarto Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Nordholt, Henk Schulte. "Decentralisation in Indonesia: Less State, More Democracy?", John Harriss, Kristian Stokke, dan Olle Törnquist (eds.), *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation*. Basingstoke [etc.]: Palgrave Macmillan, 2004.
- Pribadi, Yanwar. "Jawara in Banten: Their Socio-Political Roles in the New Order Era 1966-1998". Tesis--Leiden University, 2008.
- Reid, Anthony. *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2010.
- Suharto. "Banten dalam Masa Revolusi 1945-1949: Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". Disertasi--Universitas Indonesia, 2001.
- Tjandrasasmita. *Sultan Ageng Tirtayasa*. Jakarta: Depdikbud, 1981/1982.
- Untoro, Heriyanti O. *Kebesaran dan Tragedi Kota Banten*. Jakarta: Yayasan Kota Kita, 2006.
- Wazin dkk. "Etnis Bugis di Banten: Kajian tentang Orang Bugis di Kampung Bugis Karangantu". Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015.
- Wessing, Robert. "The Position of the Baduj in the Larger West Javanese Society", *Man*, New Series, Vol. 12, No. 2, 1977.
- Williams, Michael. *Communism, Religion, and Revolt in Banten*. Athens: Ohio University Center for International Studies, 1990.